

ABSTRAK

SITI MARIA RAHMATIKA: Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 (Studi Historis konflik Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB))

Kerusuhan Monas pada 1 Juni 2008 merupakan salah satu konflik sosial-keagamaan yang terjadi pada era Reformasi. Peristiwa ini bermula dari bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan peserta Aksi Damai Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Kerusuhan tersebut mengakibatkan puluhan korban luka serta memunculkan perdebatan mengenai kebebasan beragama, penegakan hukum, dan peran negara dalam mengelola konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Peristiwa ini menjadi salah satu momentum penting dalam dinamika hubungan antara organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan negara pada masa Reformasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang konflik antara FPI dan AKKBB yang memicu Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 serta merekonstruksi kronologi peristiwa dan dampak yang ditimbulkan pasca-kerusuhan terhadap kedua organisasi, pemerintah, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas sumber primer berupa arsip pemberitaan media massa, dokumen resmi, foto peristiwa, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga terkait. Analisis penelitian didukung oleh teori konflik Lewis A. Coser dan teori perubahan sosial Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerusuhan Monas dipengaruhi oleh perbedaan pandangan mengenai kebebasan beragama dan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, menguatnya politik identitas pada era Reformasi, serta lemahnya antisipasi aparat keamanan terhadap potensi benturan antarkelompok masyarakat. Bentrokan tersebut mengakibatkan puluhan peserta AKKBB mengalami luka-luka dan diikuti dengan proses hukum terhadap sejumlah tokoh serta anggota FPI. Peristiwa ini juga berdampak pada perubahan citra FPI di ruang publik, menguatnya advokasi kebebasan beragama oleh AKKBB dan organisasi masyarakat sipil, serta mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap penanganan konflik keagamaan dan pengamanan aksi massa.